

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang mendasari pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka kerja konseptual mirip dengan konstitusi yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar dan praktek yang sudah diterima secara umum karena kegunaan dan kelogisannya standar ini disebut standar akuntansi. Di Indonesia badan yang berwenang untuk menyusun standar akuntansi yaitu Dewan Standar Akuntansi yang berada di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan. IAI telah menghimpun prinsip-prinsip akuntansi yang dijadikan standar pelaporan keuangan di Indonesia yang dituangkan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Menurut Suwardjono dalam bukunya yang berjudul teori akuntansi, menyatakan:

Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metoda, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan

dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut.

Standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang mengenai konsep, prinsip, dan metoda yang ditetapkan sebagai pedoman utama praktik akuntansi.

Menurut Ahmed Belkaoui (2006: 161) ada empat alasan mengapa standar akuntansi dibuat, yaitu:

- a. Standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, andal, dan dapat diperbandingkan.
- b. Standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam “menjual” keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut.
- c. Standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi dan sasaran-sasaran sosial lainnya.
- d. Standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi.

Sehingga standar akuntansi keuangan (SAK) merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima secara umum. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang susah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Standar akuntansi menjelaskan transaksi yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Mengingat pentingnya Standar Akuntansi Keuangan maka mekanisme penyusunannya harus sedemikian rupa sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, standar akuntansi hanya disusun oleh pihak yang berwenang. Di Indonesia kewenangan tersebut diberikan kepada Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

2.1.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Untuk Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UKM. Oleh karena itu pengguna ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UKM. Penerbitan SAK ETAP oleh Dirjen Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini adalah sebagai alternatif PSAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit. Pada 1 Januari 2011, setiap entitas diberikan pilihan apakah akan menggunakan PSAK umum, atau SAK ETAP. Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitas publik, maka tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan PSAK umum. Namun jika tidak termasuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, maka entitas dapat memilih menerapkan SAK ETAP atau PSAK Umum.

Menurut kebijakan yang diterbitkan oleh DSAK IAI, pada 1 Januari 2001, suatu entitas tanpa akuntabilitas publik, dapat memilih untuk menerapkan SAK ETAP atau PSAK Umum. Apabila pada tahun 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik pada menetapkan penggunaan PSAK umum, maka entitas

tersebut setelah tahun 2011 tidak boleh merevisi kebijakan akuntansinya dengan menggunakan SAK ETAP. Oleh karena adanya kebijakan tidak boleh merevisi ke SAK ETAP itu, maka tahun 2011 menjadi tahun yang sangat menentukan dan strategik bagi pengambilan keputusan PSAK mana yang akan dipakai.

Karena aktivitas penyesuaian hanya perlu dilakukan oleh Entitas yang akan menerapkan SAK ETAP, maka terhadap entitas tanpa akuntabilitas publik saat ini adalah waktu yang penting untuk mulai melakukan pertimbangan apakah akan menerapkan SAK ETAP atau melanjutkan PSAK Umum. Pertimbangan itu perlu dilakukan karena:

- a. Penerapan suatu PSAK menyangkut isu strategik,
- b. Sekali entitas menetapkan menggunakan PSAK Umum maka tidak ada kesempatan lagi untuk merevisi ke SAK ETAP.

2.1.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah entitas. Menurut suwardjono (2009:65) mengatakan “Laporan Keuangan Merupakan media komunikasi dan pertanggung jawaban antara perusahaan dan para pemiliknyanya atau pihak lain”. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

Secara umum laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu. Tiap ikhtisar tersebut

dibuat dalam satu format sendiri secara terpisah. Ikhtisar posisi keuangan tercermin dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Laporan ini mengikhtisarkan status atau posisi sumber daya pada suatu saat tertentu.

Hasil usaha tercermin dalam laporan laba rugi. Ikhtisar arus kas menunjukkan sumber kas dan penggunaan kas. Ikhtisar perubahan ekuitas menunjukkan saldo awal ekuitas, mutasi tahun berjalan dan saldonya pada akhir periode yang dilaporkan. Laporan-laporan ini mengungkapkan kinerja dari arus sumber daya dari waktu ke waktu.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal/ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik umum tiap laporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Neraca.
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Modal
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu kepada para pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan selanjutnya dapat

menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang terbatas.

Namun, sejalan dengan perkembangan kepentingan kelompok pemakai informasi maka pelaporan keuangan diperluas dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Membuat keputusan investasi dan kredit. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan investasi atau keputusan kredit tanpa harus membuat lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi.
- b. Menilai prospek arus kas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai potensi arus kas di masa yang akan datang
- c. Melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan perubahan-perubahan di dalamnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat menjelaskan kekayaan perusahaan, kepemilikan dan/atau pihak-pihak yang masih berhak atas sumber daya tersebut. Informasi yang disajikan juga dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi atas sumber daya tersebut selama satu periode akuntansi yang dilaporkan.
- d. Melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik.
- e. Melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban dalam periode akuntansi yang sama.

- f. Menilai likuiditas, solvabilitas, dan arus dana. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek, jangka panjang, dan arus dana.
- g. Menilai pengelolaan dan kinerja manajemen.
- h. Menjelaskan dan menafsirkan informasi keuangan.

Menurut SAK-ETAP BAB 2 paragraf ke 1, “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu”.

2.1.5 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, atau mengoreksi hasil kerja periode lalu.

c. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

e. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsure kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

f. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

g. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang

kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

h. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

i. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.1.6 Komponen Laporan Keuangan

Menurut SAK-ETAP bab 3 paragraf ke 12 menyebutkan, “Laporan keuangan entitas” meliputi:

- a. neraca;
- b. laporan laba rugi;
- c. laporan perubahan ekuitas;
 - 1) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau

- 2) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- d. laporan arus kas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

a. Neraca

Neraca merupakan suatu laporan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Neraca menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal perusahaan. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut (SAK-ETAP bab 4 paragraf 2):

- a) Kas dan setara kas;
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c) Persediaan;
- d) Properti investasi;
- e) Aset tetap;
- f) Aset tidak berwujud;
- g) Utang usaha dan utang lainnya;
- h) Aset dan kewajiban pajak;
- i) Kewajiban diestimasi;
- j) Ekuitas.

b. Laporan laba rugi;

Laporan laba rugi menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut (SAK-ETAP bab 5 paragraf 3):

- a) Pendapatan;
- b) Beban keuangan;
- c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d) Beban pajak;
- e) Laba atau rugi neto.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Suatu entitas dalam menyajikan laporan perubahan ekuitas yaitu menunjukkan (SAK-ETAP bab 6 paragraf 3):

- a) laba atau rugi untuk periode;
- b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan
- d) koreksi kesalahan yang diakui
- e) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:

- 1) laba atau rugi;
- 2) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- 3) jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Menurut SAK ETAP informasi yang disajikan dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

a) **Aktivitas Operasi**

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- 1) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
- 2) penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapatan lain;

- 3) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - 4) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;
 - 5) pembayaran kas atau retribusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
 - 6) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.
- b) Arus kas dari aktivitas investasi
- Mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:
- 1) pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya;
 - 2) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
 - 3) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);

- 4) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas dan dimiliki untuk diperdagangkan);
 - 5) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
 - 6) penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
- c) **Aktivitas Pendanaan**

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- 1) penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;
- 2) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;
- 3) penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;
- 4) pelunasan pinjaman; pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut SAK-ETAP bab 8 paragraf 1 menyatakan “catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan paratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan

keuangan". Dalam menyajikan catatan atas laporan keuangan, struktur catatan atas laporan keuangan harus (SAK-ETAP bab 8 paragraf 2):

- a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
- b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.1.7 Pengakuan Dalam Laporan Keuangan

Elemen laporan keuangan harus didefinisikan dengan jelas agar dapat ditentukan dengan tegas kemanakah suatu objek transaksi dimasukkan ke dalam laporan. Menurut SAK-ETAP bab 2 paragraf 34 menyebutkan pengakuan dalam laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Aset
- 2) Kewajiban
- 3) Penghasilan
- 4) Beban
- 5) Laba atau Rugi

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas. FASB (Suwardjono:252) mendefinisikan aset adalah manfaat ekonomik masa dating yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas

sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Aset digunakan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas seperti produksi, konsumsi dan jual beli. Menurut SAK-ETAP bab 2 paragraf menjelaskan:

“Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi”.

2) Kewajiban

Kewajiban atau utang merupakan suatu jumlah rupiah yang harus diserahkan kepada pihak lain (dalam bentuk barang atau jasa) menggunakan kekayaan perusahaan (Suwardjono:71). Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal (SAK-ETAP bab 2 paragraf 35).

3) Penghasilan

Penghasilan merupakan aliran masuk dana (kas atau lainnya) ke dalam perusahaan karena perusahaan menjual barang atau jasa kepada konsumen atau melakukan kegiatan utama perusahaan secara terus menerus (Suwardjono:72). Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (SAK-ETAP bab 2 paragraf 36).

4) *Beban*

Biaya adalah aliran keluar sumber daya atau aset yang melekat pada produk atau jasa yang diserahkan perusahaan kepada konsumen dalam rangka menimbulkan pendapatan (Suwardjono:73). Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (SAK-ETAP bab 2 paragraf 37).

5) *Laba atau rugi*

Rugi merupakan penurunan aset akibat transaksi yang perifer (tidak erat kaitannya dengan tujuan utama perusahaan) atau bersifat insidental (Suwardjono:74).

Laba merupakan selisih bersih penghasilan dikurangi biaya dan rugi (Suwardjono:74). Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan (SAK-ETAP bab 2 paragraf 38).

2.1.8 Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Arti dari usaha kecil menengah sangat bervariasi dari setiap negara tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Terdapat dua aspek dalam mendefinisikan usaha kecil menengah yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan yang ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap.

Mokhdas dan mahfud (2005:55) menyatakan, “perusahaan kecil adalah perusahaan yang dikelola secara mandiri, dimiliki boleh perseorangan atau sekelompok kecil pemilik modal dengan ruang lingkup operasi terbatas.” Tetapi keterbatasan ruang lingkup operasional yang dihadapi usaha kecil saat ini mendapat banyak bantuan melalui teknologi komunikasi yang terus berkembang.

ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:

- a. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.
- b. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
- c. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat jika UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke Negara-negara mitra perdagangan.
- d. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan dan sarana prasarana yang kecil.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah pada bab 1 pasal 1 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:

a. Usaha Mikro

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

b. Usaha Kecil

“Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang”.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini .

Dari pengertian di atas UKM memiliki beberapa kriteria untuk masing-masing usaha yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab IV pasal 6 menerangkan bahwa:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4) Asas dan Tujuan

Dalam pembentukan UKM terdapat suatu asas yang mendasari kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai oleh UKM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah pada bab II pasal 2 menyebutkan bahwa:

1) Asas

- a) kekeluargaan;
- b) demokrasi ekonomi;
- c) kebersamaan;
- d) efisiensi berkeadilan;
- e) berkelanjutan;
- f) berwawasan lingkungan;
- g) kemandirian;
- h) keseimbangan kemajuan; dan
- i) kesatuan ekonomi nasional.

2) Tujuan

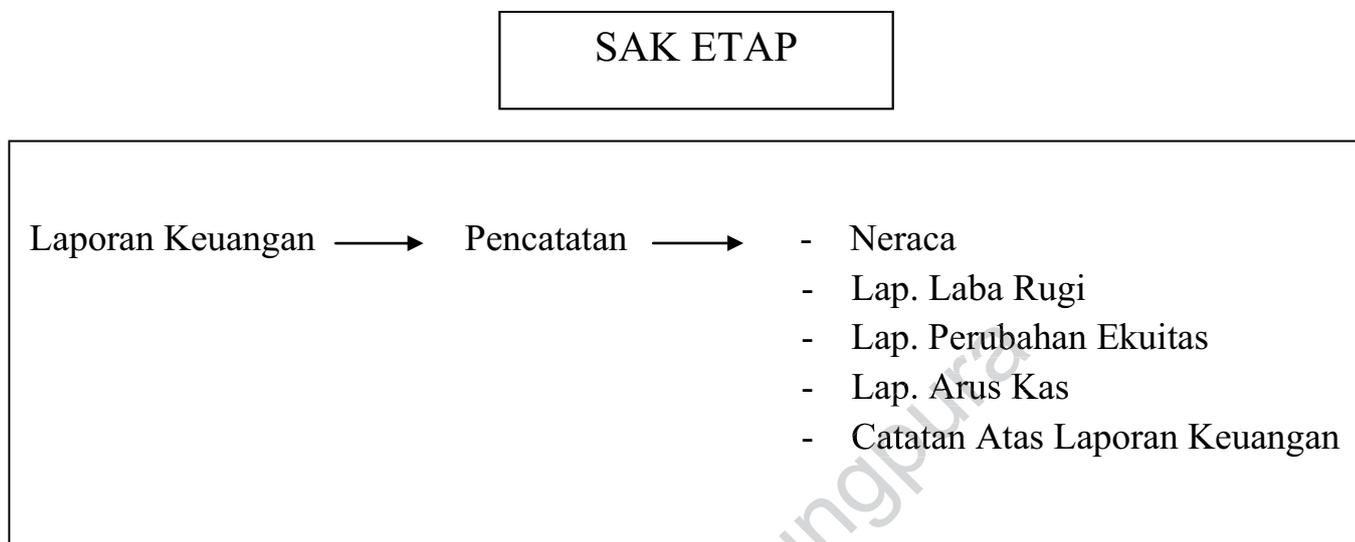
Menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan milik orang perorangan. UKM terdiri dari berbagai sektor ekonomi diantaranya adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa. Penelitian ini, akan dilaksanakan pada UKM disektor perdagangan yaitu Boutique Save Fashion. Dalam kegiatan usahanya Boutique Save Fashion telah melaksanakan pembukuan pada saat terjadi transaksi jual beli. Karena UKM Boutoque Save Fashion tergolong dalam usaha kecil maka pembukuan yang dilakukan masih sangat sederhana dan tidak menerapkan format yang berlaku secara umum.

Untuk mempermudah penyusunan dan penyajian laporan keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan EntitasTanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku secara efektif pada atau setelah 1 Januari 2011. SAK ETAP merupakan pedoman bagi seluruh entitas tanpa akuntabilitas publik termasuk UKM dalam menyusun laporan keuangan. Untuk itu peneliti menerapkan bagaimana pelaksanaan SAK-ETAP pada UKM Boutique Save Fashion sehingga dapat diketahui apakah penerapan tersebut sesuai atau tidak dengan SAK-ETAP.

Gambar 2.1



Gambar : Kerangka Pemikiran